

**RENJA
T.A 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

RANCANGAN RENJA PERUBAHAN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Pengertian Renja	2
1.1.2 Proses Penyusunan Renja	2
1.1.3 Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	17
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Tapin	28
2.3. Isu-isu Penting Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Tapin	32
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	44
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	44
3.1.1. Kebijakan Nasional	44
3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMD	48
3.3. Program dan Kegiatan	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V. PENUTUP	56

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin tahun 2025 telah dapat diselesaikan. Perubahan Renja Tahun 2025 yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja Tahun 2025 yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran SKPD. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya perubahan renja tahun 2025 ini diucapkan terima kasih.



Rantau, Agustus 2025
KEPALA,

Drs. RAHMADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760302 199412 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perbub Nomor 33 Tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin menyusun Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tapin.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Perubahan Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Perubahan RENJA ini, diharapkan sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tapin dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapin.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tapin yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan sesuai Peraturan Bupati Tapin No. 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

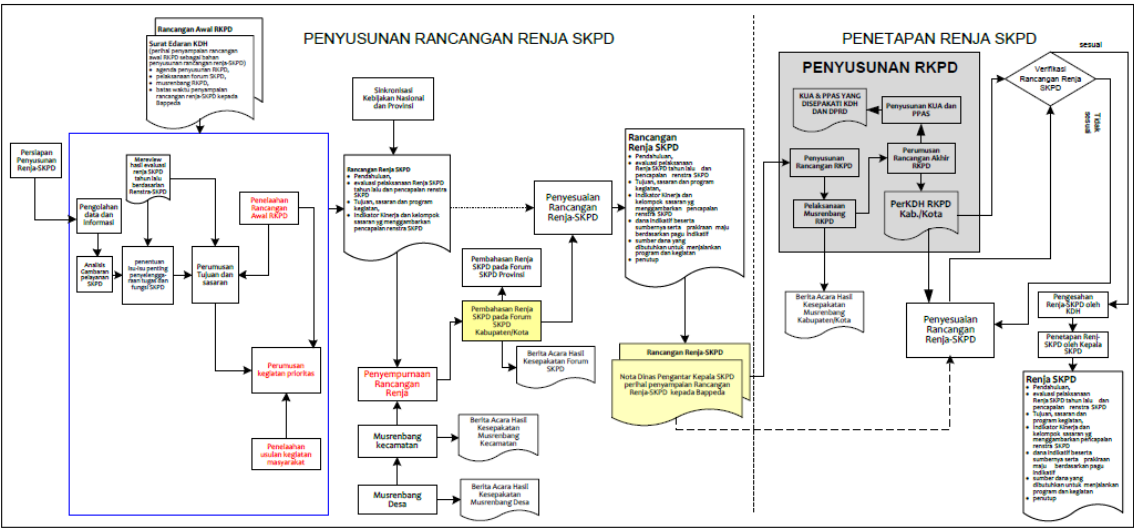
1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja Perubahan OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.

- 2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
- 3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
- 4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Perubahan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Perubahan Renja

- ☐ Pembentukan Tim Penyusun Renja
- ☐ Orientasi mengenai Renja
- ☐ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- ☐ Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Perubahan Renja

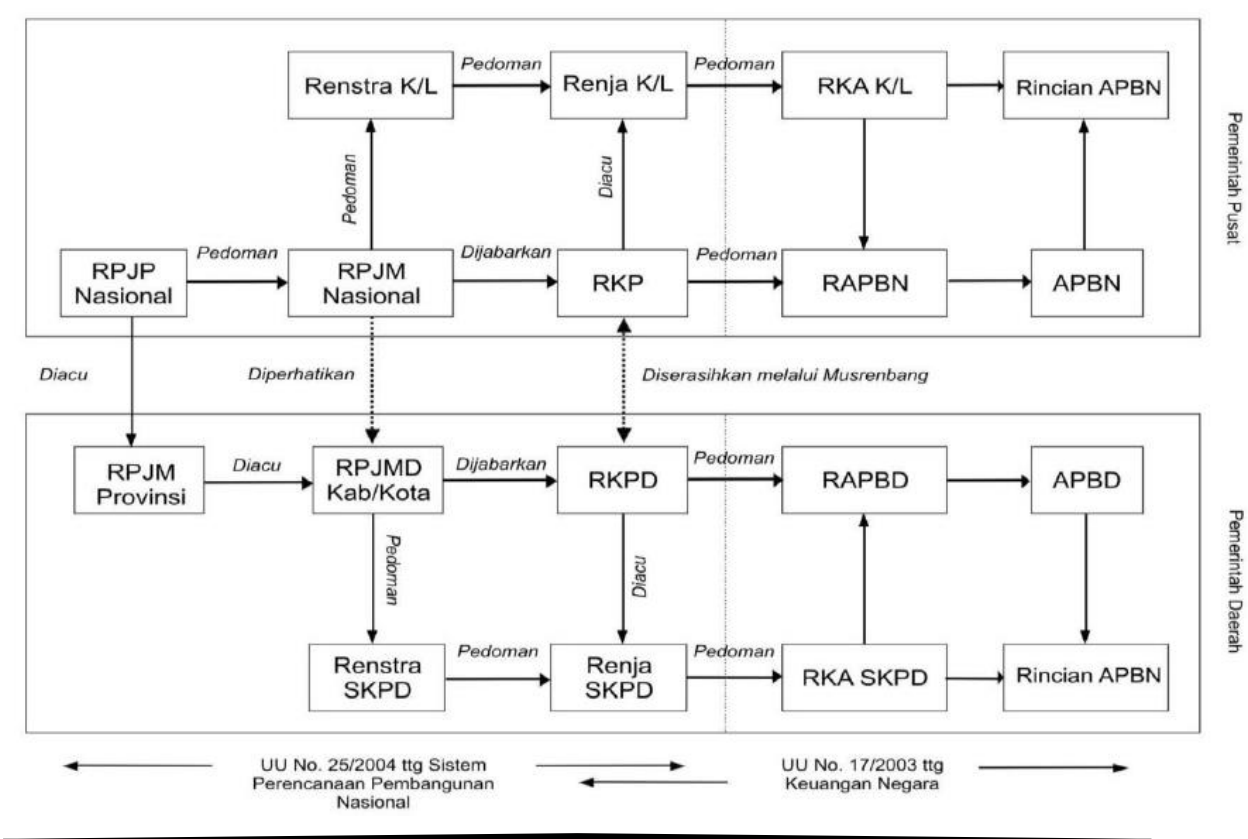
- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan OPD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- Pembahasan forum OPD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian Perubahan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan Perubahan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu tiga tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari Perubahan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023- 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 13);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Momor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03) Tanggal 20 Agustus 2025
38. Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09)
39. Keputusan Bupati Tapin Nomor 100.3.3.2/ 139 / KUM /2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025
40. Surat Edaran Nomor 000.7.2/102 – Randal /Bappelitbang/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara program daerah, program provinsi dan program nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

Tujuan rencana kerja tahun 2025 yaitu :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra DPMD Kab.Tapin tahun kedua yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan tiga tahunan 2024 – 2026
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja DPMD kabupaten tapin tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan renja, landasan hukum penyusunan renja, maksud dan tujuan penyusunan renja dan sistematika penulisan dokumen renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, serta review terhadap rancangan perubahan RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Perubahan Renja SKPD, program, kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Bab uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana yang tidak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Terdapat lima (5) program yang menjadi garapan wajib Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dalam mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : ***“Terwujudnya Desa Mandiri melalui Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Pemberdayaan Masyarakat”*** . Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025, menunjukan bahwa semua program dan kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dari tingkat realisasi rata-rata sampai dengan tahun 2024 adalah 98,44 % dimana sejak berdiri tahun 2008 DPMD Kabupaten Tapin telah menetapkan Renstra 2024 – 2026.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Realisasi Program/Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan SKPD meliputi Renja, Renstra, IKU, Penetapan Kinerja, LKIP, LKPJ dan LKPD serta Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per triwulan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.939.950,- dana terserap sebesar Rp. 11.283.000,- atau 66,61% dengan capaian kinerja 64%.

2. Administrasi Keuangan Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan ASN, meningkatkan kesejahteraan ASN dan meningkatkan disiplin dan kinerjanya dan dapat memberikan kualitas layanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, dana yang terserap Rp. 1.843.756.449,- dari Rp.3.982.859.625,- atau terserap sebesar 46,29% dengan capaian kinerja 53%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD akhir tahun dana yang terserap Rp. 6.543.000,- dari Rp. 6.547.000,- atau terserap sebesar 99,94% dengan capaian kinerja 100%.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan keuangan SKPD Semesteran atau pertengahan tahun berjalan dengan dana yang terserap sebesar Rp. 3.135.000,- dari anggaran sebesar Rp. 3.621.000,- atau terserap sebesar 86,58% dengan capaian kinerja 87%.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPMD dalam tata usaha kantor dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 9.600.000,- dari Rp. 38.926.400,- atau sebesar 24,66% dengan capaian kinerja 25%.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPMD dalam penyediaan bahan logistik kantor dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 37.325.400,- dari Rp. 108.908.800,- atau sebesar 34,27% dengan capaian kinerja 50%.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPMD dalam tata usaha perkantoran dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 12.918.000,- dari Rp. 22.892.200,- atau sebesar 56,43% dengan capaian kinerja 50%.

d. Penyediaan Bahan/Material

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPMD dalam hal penyediaan Bahan / Material dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 0,- dari Rp. 25.887.850,- atau sebesar 0% dengan capaian kinerja 0%, karena kegiatan ini belum dilaksanakan.

e. Fasilitas Kunjungan Tamu

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPMD dalam hal pelayanan untuk tamu yang datang ke kantor DPMD, dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 990.000,- dari Rp. 2.000.000,- atau sebesar 49,50% dengan capaian kinerja 50%.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPMD dalam penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah, dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 375.820.943,- dari Rp. 524.231.000,- atau sebesar 71,69% dengan capaian kinerja 72%.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPMD dalam hal pengadaan peralatan dan mesin lainnya, belum direalisasikan dari pagu sebesar Rp. 132.224.600,-.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPMD dalam pengadaan sarana dan prasarana gedung. Namun belum direalisasikan.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPMD dalam penyediaan jasa surat menyurat, dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 7.000.000,- dari Rp. 12.000.000,- atau sebesar 58,33% dengan capaian kinerja 75%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPMD dalam penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dimana

anggaran yang terserap sebesar Rp. 24.693.421,- dari Rp. 75.297.452,- atau sebesar 32,79% dengan capaian kinerja 50%.

c. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPMD dalam penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 59.628.840,- dari Rp. 150.775.200,- atau sebesar 39,55% dengan capaian kinerja 50%.

6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPMD dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 36.530.323,- dari Rp. 94.050.000,- atau sebesar 38,84% dengan capaian kinerja 43%.

b. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu tugas pokok dan fungsi DPMD, dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 4.320.000,- dari Rp. 6.360.800,- atau sebesar 67,92% dengan capaian kinerja 50%.

1. Program Penataan Desa

1. Penyelenggaraan Penataan Desa

a. **Fasilitasi Tata Wilayah Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk sosialisasi dalam menentukan batas desa, namun belum direalisasikan.

b. **Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa**

Untuk tahun 2025 kegiatan ini ditiadakan.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

a. **Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota**

Untuk tahun 2025 kegiatan ini ditiadakan.

b. **Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyaluran dana BPJS untuk kepala desa dan perangkat desa, dimana anggaran yang terserap sebesar Rp.

946.424.544,- dari Rp. 1.680.824.700 atau sebesar 56,31% dengan capaian kinerja 25%.

c. **Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk kegiatan karya bakti TNI dengan total pagu sebesar Rp. 20.667.912.000, dana yang terserap Rp. 8.654.284.500, dengan capaian realisasi 41,87%, capaian kinerja 42%.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a. **Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk fasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa, namun belum diralisasikan dengan pagu sebesar Rp. 106.158.700,-.

b. **Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk sosialisasi dalam perencanaan pembangunan desa, dimana anggaran yang terserap sebesar 1.650.000,- dari Rp. 18.929.300,- atau sebesar 8,72% dengan capaian kinerja 52%.

c. **Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk sosialisasi dan pembinaan dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 7.715.000,- dari Rp. 14.392.900,- atau sebesar 53,60% dengan capaian kinerja 48%.

d. **Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk workshop dan pembinaan serta pemberdayaan Bumdes, namun anggaran dalam kegiatan ini belum terealisasi karena efisiensi.

e. **Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, namun belum terealisasi.

f. **Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk sosialisasi dan fasilitasi dalam pengelolaan aset desa di setiap desa yang ada di Kabupaten Tapin, namun belum terealisasi.

g. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk sosialisasi dalam Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, namun belum terealisasi karena efisiensi anggaran.

h. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk sosialisasi dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan, dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 4.950.000,- dari Rp. 33.487.600,- atau sebesar 14,78% dengan capaian kinerja 15%.

i. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Untuk tahun 2025 kegiatan ini belum terealisasi karena efisiensi anggaran.

j. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengelolaan keuangan desa dan gaji PTT tim satgas, anggaran yang terserap sebesar Rp. 69.045.000 dari Rp. 146.435.000,- atau sebesar 47,15% dengan capaian kinerja 25%.

k. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Kegiatan ini ditiadakan karena efisiensi anggaran.

l. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Untuk tahun 2025 kegiatan ini ditiadakan karena efisiensi anggaran.

m. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dalam kegiatan ini dana yang terserap sebesar Rp. 7.875.000,- dari Rp.18.471.200,- atau sebesar 42,63% dengan capaian kinerja 43%.

n. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Kegiatan ini belum terealisasi karena efisiensi anggaran.

o. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

Untuk tahun 2025 kegiatan ini ditiadakan.

p. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Dalam kegiatan ini dana yang terserap sebesar Rp. 1.650.000,- dari Rp. 16.933.200,- atau sebesar 9,74% dengan capaian kinerja 64%.

q. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

Kegiatan ini belum terealisasi karena efisiensi anggaran

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Penataan., Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Fasilitasi Penataan., Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 84.037.000,- dari Rp. 213.065.600,- atau sebesar 39,44% dengan capaian kinerja 39%.

- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 85.622.500,- dari Rp. 302.789.402,- atau sebesar 28,88% dengan capaian kinerja 60%.

- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 46.640.000,- dari Rp. 194.040.330,- atau sebesar 24,04% dengan capaian kinerja 24%.

- d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dimana anggaran yang terserap sebesar Rp. 26.635.000,- dari Rp. 257.515.950,- atau sebesar 10,34% dengan capaian kinerja 100%.

- e. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 13.620.000 dari pagu sebesar Rp. 105.897.250,- atau 12,86% dengan capaian kinerja 100%.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian
Renstra SKPD s/d Tahun 2024
DPMD Kabupaten Tapin**

Tabel T-II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

Kode Anggaran					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d sampai dengan Tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Th berjalan		Catatan
									Target Renja Perangkat Daerah Th 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2025	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					URUSAN WAJIB										
2	13				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Kinerja	28,00	26,10	27,40	0	0	27,40	100	100	
						Pengukuran Kinerja	18,79	23,70	25,05	0	0	25,05	100	100	
						Pelaporan Kinerja	13,21	11,25	11,30	0	0	11,30	100	100	
						Evaluasi Internal	17,05	16,00	16,30	0	0	16,30	100	100	
						Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	100	100	25	100	100	100	100	100	
						Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	90	15	25	48	48	100	100	100	
						Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	90	15	25	48	48	100	100	100	

2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tindak lanjut Perencanaan Kinerja Atas Rekomendasi dari Mitra Kerja Bappelitbang	100	100	25	50	50	100	100	100	
						Persentase Rekomendasi LHE AKIP yang Ditindak Lanjuti	100	100	0	0	0	100	100	100	
						Persentase Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Kinerja yang Ditindaklanjuti	100	100	25	50	50	100	100	100	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	14	4	9	64	14	100	100	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang Sesuai dengan Standar Penatausahaan Keuangan	100	100	100	50	50	100	100	100	
						Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	100	0	100	100	100	100	100	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	308	308	112	198	53	374	100	100	
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	0	1	100	1	100	100	
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	0	0	0	1	100	100	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100	100	25	25	25	100	100	100	

2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	12	1	1	25	4	100	100	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	12	1	2	50	4	100	100	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	12	2	3	50	6	100	100	
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan / Material yang disediakan	12	12	1	0	0	4	100	100	
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	1	2	50	4	100	100	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	200	535	72	744	100	100	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100	100	25	34	34	100	100	100	
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	4	1	0	0	3	100	100	
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0	0	1	0	0	1	100	100	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas ASN	100	100	25	50	50	100	100	100	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12	12	1	3	75	4	100	100	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jasa Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	3	6	50	12	100	100	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12	3	6	50	12	100	100	

2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100	100	25	0	34	100	100	100	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7	7	1	3	43	7	100	100	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	12	12	5	20	50	40	100	100	
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	2	0	0	0	0	0	0	
2	13	02			Program Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan	100	100	15	30	46	65	100	100	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase wilayah desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	100	40	40	44	90	100	100	
						Jumlah pemerintah desa yang terfasilitasi terkait wilayah desa	0	0	0	50	40	126	100	100	
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	126	126	0	0	0	1	1	100	
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangan desanya	0	0	0	0	0	0	0	100	
2	13	03			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan	100	100	15	30	46	65	100	100	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase kelembagaan antar desa yang berkerjasama	100	100	30	60	60	100	100	100	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	1	0	0	0	0	0	0	

2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	126	126	1	1	25	4	100	100	
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	7	7	0	0	0	1	100	100	
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan	100	100	15	30	46	65	100	100	
						Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju	5	3	0	10	167	6	100	100	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terpilih sesuai ketentuan yang berlaku	90	90	25	25	25	100	100	100	
						Persentase Jumlah kepala desa yang diberikan sosialisasi	90	90	100	50	50	100	100	100	
						Persentase aparatur desa yang mendapatkan pelatihan tentang tata cara pengangkatan perangkat desa	0	0	0	50	50	100	100	100	
						Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan	90	100	25	45	45	100	100	100	
						Persentase Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa yang mendapatkan pelatihan tentang tata kelola keuangan desa	0	0	25	50	50	100	100	100	
						Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	0	0	50	50	50	100	100	100	

					Persentase laporan keuangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan	0	0	50	50	50	100	100	100	
					Persentase desa yang melakukan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan	80	100	50	50	50	100	100	100	
					Persentase Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Tata Usaha/Kaur Umum yang mendapatkan pelatihan tentang tata kelola aset desa	0	0	25	50	50	100	100	100	
					Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	0	0	50	50	50	100	100	100	
					Persentase laporan aset pemerintah desa sesuai dengan ketentuan	0	0	50	40	40	100	100	100	
					Persentase Bumdes dan Bumdesma yang menghasilkan PADes	54	61	0	84	138	61	100	100	
					Persentase bumdes dan bumdesma yang aktif	66	74	0	100	135	74	100	100	
					Jumlah bumdes dan bumdesma yang bekerja sama dengan pihak ketiga	1	4	0	1	100	1	100	100	
					Persentase bumdes dan bumdesma yang berbadan hukum	35	45	6	56	112	50	100	100	
					Jumlah dokumen pengajuan legalitas hukum yang di monitoring	1	4	0	1	100	1	100	100	
					Jumlah bumdes dan bumdesma yang difasilitasi legalitas pengajuan hukumnya	1	4	5	70	111	63	100	100	

2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	126	126	1	0	0	1	100	100	
	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	12	12	2	4	80	5	100	100	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan Desa	1	1	0	66	52	126	100	100	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	0	1	1	25	4	100	100	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	126	126	126	60	48	126	100	100	
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1	1	0	0	0	0	0	0	
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan Bumdesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	12	12	0	0	0	1	100	100	
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	1	1	1	0	0	1	100	100	
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	0	0	0	0	1	100	100	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	1	1	0	0	0	1	100	100	

2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi manajemen pemerintahan desa	1	1	0	0	0	0	0	0	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	126	126	0	1	50	2	100	100	
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	126	126	126	0	0	126	100	100	
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	50	100	55	70	64	110	100	100	
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1	0	1	1	100	1	100	100	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1	1	0	0	0	1	100	100	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga desa yang berprestasi	10,31	10,31	5	51	298	17	100	100	
						Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju	5	3	0	10	167	6	100	100	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	81	81	100	100	100	100	100	100	
						Persentase lembaga masyarakat yang dibina	100	100	40	52	52	100	100	100	

					Persentase hasil Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditindaklanjuti	50	50	15	52	105	50	100	100	
					Persentase Badan kerjasama antar desa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan	70	70	15	67	93	72	100	100	
					Persentase MoU yang dihasilkan	42	42	5	58	130	45	100	100	
					Persentase desa yang menghasilkan inovasi	50	45	0	0	0	50	100	100	
					Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna	5	41	0	0	0	45	100	100	
					Persentase posyantek dan posyantekdes yang aktif	50	50	25	14	28	50	100	100	
					Persentase posyantek dan posyantekdes yang tertib administrasi	100	75	25	14	14	100	100	100	
					Persentase Bumdes dan Bumdesma yang dibina	100	100	32	18	18	100	100	100	
					Persentase bumdes dan bumdesma yang tertib administrasi dan berbadan hukum	35	60	0	33	73	45	100	100	
					Persentase pengelola bumdes dan bumdesma yang memahami tugas dan fungsi	100	80	32	20	25	80	100	100	
					Jumlah bumdes yang mendapatkan reward	54	56,35	0	0	0	56	100	100	

2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemeberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	1	1	0	0	0	1	100	100	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	5	5	3	3	60	5	100	100	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12	12	0	0	0	1	100	100	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12	12	0	1	1000	1	100	100	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0	0	1	1	100	1	100	100	

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Tapin

Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.												
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa												
Kabupaten Tapin												
NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	78,00	-	-	75,75	78,00	79,00	80,00	
2	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	50,00	60,00	65,00	44,3	50,00	60,00	65,00	
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan tata kelola desa		Persentase Desa Mandiri	8,73	20,63	31,75	43,65	9,52	20,63	31,75	43,65	
			Persentase Desa Swasembada	19,047	39,68	47,62	51,59	30,95	39,68	47,62	51,59	

b. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

c. Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran IP ASN tidak hanya bermanfaat bagi sebuah organisasi atau instansi pemerintah, melainkan juga para pegawai juga masyarakat. Bagi pegawai yang diukur, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai Pegawai ASN. Bagi instansi pemerintah, pengukuran ini digunakan sebagai dasar perumusan

dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Yang terakhir bagi masyarakat, manfaatnya adalah sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

d. Persentase Desa Mandiri

Perangkat indikator dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

1. **Indeks Ketahanan Sosial**, dilengkapi dengan data pada bagian kesehatan yang terdiri dari data ketersediaan sarana kesehatan, rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, rumah bersalin, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, apotik, ketersediaan tenaga kesehatan bidan, ketersediaan tenaga kesehatan dokter, ketersediaan tenaga kesehatan lainnya, akses ke poskesdes/ polindes dan posyandu, tingkat kepesertaan BPJS/JKN/KIS, derajat kesehatan dan gizi buruk, sasaran 1000 hari pertama kehidupan (HPK), pengukuran tikar pertumbuhan usia anak 0 – 23 bulan, dan kelengkapan konvergensi paket layanan pencegahan stunting bagi 1000 HPK. Pada bagian pendidikan, dilengkapi dengan data terkait akses ke pendidikan dasar dan menengah, data tingkat pendidikan, akses ke pendidikan non-formal usia 3 – 5 tahun, dan akses pengetahuan, modal sosial, keamanan warga, kesejahteraan sosial. Pada bagian permukiman, dilengkapi dengan data terkait akses air bersih dan

air minum, akses sanitasi, akses listrik, dan akses informasi dan komunikasi. Indeks Ketahanan Sosial didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Jumlah lembaga kemasyarakatan di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan;
- b. Jumlah desa yang memiliki peningkatan keberdayaan kesehatan;
- c. Jumlah desa yang memiliki peningkatan solidaritas sosial;
- d. Jumlah desa yang memiliki peningkatan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

2. **Indeks Ketahanan Ekonomi**, dilengkapi dengan data terkait keragaman produksi masyarakat desa, akses ke pusat perdagangan, akses distribusi / logistik, akses Lembaga keuangan, ketersediaan Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Indeks Ketahanan Ekonomi didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Jumlah desa yang mengalami peningkatan lembaga ekonomi desa;
- b. Jumlah desa yang mengalami peningkatan keragaman produksi masyarakat desa.

3. **Indeks Ketahanan Lingkungan**, dilengkapi dengan data terkait kondisi lingkungan dan potensi bencana. Indeks Ketahanan Lingkungan didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Jumlah desa yang memiliki peningkatan sarana prasarana desa dan kawasan perdesaan;
- b. Jumlah desa yang memiliki peningkatan sumber daya alam.

Indeks Desa Membangun selain Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan perlu dilengkapi pula dengan peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui dua sasaran yakni meningkatnya desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik kemudian pada tahun 2023 dilanjutkan oleh peningkatan kepuasan pelayanan pemerintahan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Jumlah desa yang mengalami peningkatan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan baik;
- b. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antardesa;
- c. Jumlah desa yang mengalami peningkatan pengelolaan administrasi keuangan dan asset desa dengan baik;
- d. Jumlah desa yang berprestasi;
- e. Jumlah desa yang memiliki profil paling terbaru.

Berdasarkan surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025 – 2045 maka untuk penyusunan Renstra DPMD Tahun

2024 – 2026 dilakukan penyesuaian target capaian Persentase Desa Mandiri untuk Tahun 2025 dan 2026 dimana untuk target Tahun 2025 dan 2026 mengalami pengurangan target yaitu untuk Tahun 2024 sebelum adanya perubahan metode dan indikator perhitungan pemeringkatan Desa Mandiri, target Persentase Desa Mandiri adalah sebesar 20,63% atau 26 Desa namun untuk Tahun 2025 sebesar 3,17 atau 4 Desa dan untuk Tahun 2026 sebesar 3,97% atau 5 Desa, berdasarkan Baseline dan Target Persentase Desa Mandiri per provinsi dimana untuk Kalsel Baseline Desa Mandiri 2025 sebesar 2,62% dan Target Desa Mandiri 2045 sebesar 19,60% . Hal ini disebabkan karena perubahan indikator dan metode dalam perhitungan pemeringkatan Desa, dimana pada Tahun 2024 menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) sedangkan mulai Tahun 2025 persentase desa mandiri sudah menggunakan Indeks Desa.

Dalam Indeks Desa, desa dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi status (*status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri*). Apabila di tahun 2045 target Desa Mandiri yang ditetapkan relatif kecil, ada kecenderungan bahwa target di status lainnya seperti Desa Maju dan Desa Berkembang yang lebih besar. Selain itu, penetapan target di tahun 2045 mempertimbangkan beberapa hal antara lain (a) Karakteristik dan tema pembangunan wilayah; (b) kondisi daerah di tahun *baseline*; (c) kemampuan daerah

Indeks Desa menjadi indikator kinerja pembangunan desa yang universal, sejalan dengan implementasi pemerataan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang mengamanatkan penyelesaian ketimpangan untuk mencapai salah satu Visi Indonesia Emas 2045, yakni kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang. Di 2023, BPS mencatat kemiskinan perdesaan mencapai 12,22 persen, di atas kemiskinan perkotaan yakni sebesar 7,29 persen. Untuk itu, mewujudkan pembangunan yang merata tidak hanya menargetkan pengurangan ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, tetapi juga menekan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan. “Pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045 dititikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan desa yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa.

e. **Persentase Desa Swasembada**

Desa swasembada adalah jenis desa di mana masyarakatnya dapat memenuhi sebagian besar, jika tidak semua, setidaknya kebutuhan mereka sendiri. Masyarakat desa swasembada sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa secara optimal. Mereka tidak bergantung secara signifikan pada pasokan dari luar desa untuk makanan, air, energi, dan barang-barang penting lainnya.

Desa Swasembada adalah konsep pembangunan desa yang bertujuan untuk mencapai kemandirian pangan di tingkat desa. Dalam desa swasembada, masyarakat desa berupaya untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri secara mandiri, dengan mengoptimalkan potensi pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor agribisnis lainnya. Desa swasembada berfokus pada peningkatan produksi pertanian, pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, dan peningkatan akses pasar bagi produk pertanian desa. Dengan menjadi desa swasembada, desa dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2.3 Isu-Isu Penting Tugas Dan Fungsi DPMD Kabupaten Tapin

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam pola organisasi pemerintah daerah, dengan organisasi pemerintah kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

Isu-isu yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memiliki dimensi yang cukup luas yakni otonomi desa, keberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat.

- a. Otonomi Desa, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan Pemantapan Kerangka Aturan/Regulasi: Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Desa; Pemantapan pengelolaan keuangan desa; Pemantapan Administrasi Pemerintahan Desa; Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa; dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan desa kearah yang lebih demokratis.
- b. Keberdayaan masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, soaial budaya, lingkungan hidup dan politik, sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan.
- c. Partisipasi masyarakat, merupakan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Sesuai dengan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2025 ditetapkan 13 prioritas pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025 yang diadopsi dari arah kebijakan pembangunan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan pendidikan di kecamatan Tapin Selatan berbasis IT
2. Pemerataan kualitas layanan dan sarana prasarana kesehatan
3. Optimalisasi diversifikasi pertanian
4. Pengembangan perkebunan kerakyatan
5. Peningkatan iklim investasi daerah
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dan perumahan
7. Mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup
8. Peningkatan pendapatan petani/buruh pertanian pada sektor unggulan daerah
9. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
10. Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah
11. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
12. Pembentukan Perusahaan Daerah Tapin
13. Menjaga kondusifitas wilayah dalam pelaksanaan Pilpres dan Pilkada

Program DPMD Kabupaten Tapin untuk tahun 2025 mengacu pada rancangan RKPD tahun 2025 dan untuk kegiatan terdiri dari 5 Program dengan 10 Kegiatan dan 44 sub kegiatan . Seperti tertulis pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2025
Kabupaten Tapin
(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(ambil dari Rancangan Awal Renja th 2025)					(ambil dari Rancangan Awal Renja th 2025)					
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				34.722.818.559	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				34.722.818.559	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tapin	Persentasi program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	5.914.304.377	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Tapin	Persentasi program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	5.914.304.377	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TAPIN	Persentasi laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindak lanjuti, Persentasi rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti, Persentasi tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra	100%	16.939.950	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TAPIN	Persentasi laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindak lanjuti, Persentasi rekomendasi LHE	100%	16.939.950	

			kerja Bappelitbang					AKIP yang ditindak lanjuti, Persentasi tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	16.939.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	16.939.950	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TAPIN	Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang Sesuai dengan Standar Penatausahaan Keuangan, Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	3.994.027.565	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TAPIN	Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang Sesuai dengan Standar Penatausahaan Keuangan, Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	3.994.027.565	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapin	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	378 Orang/Bulan	3.983.859.565	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapin	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	378 Orang/Bulan	3.983.859.565	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapin	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.547.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapin	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	6.547.000	

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tapin	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.621.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tapin	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.621.000	
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TAPIN	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	1.067.329.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TAPIN	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	1.067.329.250	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapin	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	38 Paket	38.926.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapin	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	38 Paket	38.926.400	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapin	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11 Paket	108.908.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapin	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang disediakan	11 Paket	108.908.800	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tapin	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket	22.890.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tapin	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket	22.890.200	
8	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tapin	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	9 Paket	25.887.850	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tapin	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	9 Paket	25.887.850	
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tapin	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tapin	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2.000.000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapin	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	744 Laporan	868.716.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapin	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	744 Laporan	868.716.000	

IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TAPIN	Persentasi barang milik daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%	497.524.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TAPIN	Persentasi barang milik daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%	497.524.100	
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	50 Unit	132.224.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	50 Unit	132.224.600	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	365.299.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	365.299.500	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TAPIN	Persentasi kelulusan ASN perangkat daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN	100%	238.072.652	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TAPIN	Persentasi kelulusan ASN perangkat daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN	100%	238.072.652	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapin	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapin	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	12.000.000	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapin	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	75.297.452	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapin	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	75.297.452	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	150.775.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	150.775.200	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TAPIN	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100%	100.410.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TAPIN	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100%	100.410.800	

16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tapin	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	94.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tapin	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	94.050.000	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	4.615.779	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	4.615.779	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	87.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	87.500.000	
B	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase desa yang tertata sesuai dengan ketentuan	65%	26.680.824.700	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase desa yang tertata sesuai dengan ketentuan	65%	26.680.824.700	
1	Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Kabupaten Tapin	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	4 Dokumen	1.680.824.700	Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Kabupaten Tapin	Terlaksananya Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	4 Dokumen	1.680.824.700	
2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Tapin	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	25.000.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Tapin	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	25.000.000.000	
C	PROGRAM PENATAAN DESA	Tapin	Persentase desa yang tertata sesuai dengan ketentuan	65%	15.037.800	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase desa yang tertata sesuai dengan ketentuan	65%	15.037.800	
1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Tapin	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	1 Desa	15.037.800	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Tapin	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	1 Desa	15.037.800	
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju	6%	1.039.343.150	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju	6%	1.039.343.150	

1	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa	TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan pemberdayaan BUMDESA dan lembaga kerjasama antar desa	1 Dokumen	298.443.300	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Des dan Lembaga Kerjasama antar Desa	TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan pemberdayaan BUMDESA dan lembaga kerjasama antar desa	1 Dokumen	298.443.300	
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	106.158.700	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	106.158.700	
3	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	TAPIN	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	TAPIN	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50.000.000	
4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	126 Dokumen	18.682.500	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	126 Dokumen	18.682.500	
5	Fasilitas pengelolaan keuangan desa	TAPIN	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	4 Dokumen	146.435.000	Fasilitas pengelolaan keuangan desa	TAPIN	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	4 Dokumen	146.435.000	
6	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	TAPIN	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	252 Orang	139.516.300	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	TAPIN	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	252 Orang	139.516.300	
7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	TAPIN	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	14.688.550	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	TAPIN	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	14.688.550	

8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	TAPIN	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	18.471.200	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	TAPIN	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	18.471.200	
9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	TAPIN	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	14.692.900	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	TAPIN	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	14.692.900	
13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	TAPIN	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	2 Dokumen	16.172.300	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	TAPIN	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	2 Dokumen	16.172.300	
14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	TAPIN	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	126 Orang	150.823.900	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	TAPIN	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	126 Orang	150.823.900	
15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	TAPIN	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	110 Desa	16.933.200	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	TAPIN	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	110 Desa	16.933.200	
16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	TAPIN	Jumlah laporan hasil fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	1 Laporan	14.837.700	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	TAPIN	Jumlah laporan hasil fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	1 Laporan	14.837.700	
17	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan	TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	33.487.600	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan	TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	33.487.600	
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase lembaga desa yang berprestasi	17%	1.073.308.532	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase lembaga desa yang berprestasi	17%	1.073.308.532	
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	1 Dokumen	213.065.600	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan	1 Dokumen	213.065.600	

	/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna)Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna)Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	TAPIN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	302.789.402	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	TAPIN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	302.789.402	
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	TAPIN	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 Dokumen	194.040.330	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	TAPIN	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 Dokumen	194.040.330	
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	TAPIN	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintahan Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	257.515.950	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	TAPIN	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintahan Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	257.515.950	

5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	TAPIN	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	105.897.250	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	TAPIN	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	105.897.250	
---	--	-------	--	-----------	-------------	--	-------	--	-----------	-------------	--

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Prov Kalsel, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. TAPIN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								50.692.184.884,00	34.722.818.559,00	29.805.247.559,00	-20.886.937.325,00						0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							50.692.184.884,00	34.722.818.559,00	29.805.247.559,00	-20.886.937.325,00							0,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							50.692.184.884,00	34.722.818.559,00	29.805.247.559,00	-20.886.937.325,00							0,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.924.196.425,00	5.914.303.537,00	5.578.826.877,00	-7.924.196.425,00							0,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang				-	14 Laporan	16.920.000,00	16.939.950,00	16.939.950,00	19.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Kab. Tapin		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	14 Laporan	16.920.000,00	16.939.950,00	16.939.950,00	19.950,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEMDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.178.040.424,00	3.994.026.565,00	3.993.033.613,00	814.993.189,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Tapin		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					378 Orang/ bulan	378 Orang/ bulan	3.170.327.424,00	3.983.858.565,00	3.982.865.613,00	812.538.189,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	4.092.000,00	6.547.000,00	6.547.000,00	2.455.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					2 Laporan	2 Laporan	3.621.000,00	3.621.000,00	3.621.000,00	0,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					-	-	3.496.873.270,00	1.064.329.470,00	743.121.150,00	-2.753.752.120,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan	Kabupaten Tapin		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					38 Paket	38 Paket	46.527.300,00	35.317.500,00	38.926.400,00	-7.600.900,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					11 Paket	11 Paket	80.927.100,00	108.891.600,00	109.716.300,00	28.789.200,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	28.699.000,00	28.700.200,00	27.959.600,00	-739.400,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	19.600.870,00	20.704.170,00	25.887.850,00	6.286.980,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	3.500.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	2.900.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				744 Laporan	744 Laporan	3.317.619.000,00	868.716.000,00	534.231.000,00	-2.783.388.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	749.384.300,00	497.524.100,00	497.524.100,00	-251.860.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Tapin		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	197.586.000,00	132.224.600,00	132.224.600,00	-65.361.400,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	551.798.300,00	365.299.500,00	365.299.500,00	-186.498.800,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	241.072.652,00	241.072.652,00	219.388.052,00	-21.684.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Tapin		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	75.297.452,00	75.297.452,00	71.012.852,00	-4.284.600,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	150.775.200,00	150.775.200,00	136.375.200,00	-14.400.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	241.905.779,00	100.410.800,00	108.820.012,00	-133.085.767,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Tapin			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	149.790.000,00	94.050.000,00	94.050.000,00	-55.740.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	4.615.779,00	6.360.800,00	14.770.012,00	10.154.233,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	87.500.000,00	0,00	0,00	-87.500.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-				-	-	31.037.600,00	16.069.100,00	0,00	-31.037.600,00								0,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-				-	-	31.037.600,00	16.069.100,00	0,00	-31.037.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Kabupaten Tapin			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																			
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				27 Desa	27 Desa	400,00	16.069.100,00	0,00	-400,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa																			
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				1 Desa	1 Desa	31.037.200,00	0,00	0,00	-31.037.200,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-				-	-	37.947.607.660,00	26.680.824.700,00	22.348.736.700,00	-37.947.607.660,00							0,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-				-	-	37.947.607.660,00	26.680.824.700,00	22.348.736.700,00	-15.598.870.960,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Kabupaten Tapin		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	22.785.000,00	0,00	0,00	-22.785.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				126 Dokumen	126 Dokumen	1.901.352.660,00	1.680.824.700,00	1.680.824.700,00	-220.527.960,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	36.023.470.000,00	25.000.000.000,00	20.667.912.000,00	-15.355.558.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	3.730.408.799,00	1.038.312.170,00	754.378.300,00	-3.730.408.799,00							0,00	

2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	3.730.408.799,00	1.038.312.170,00	754.378.300,00	-2.976.030.499,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Kabupaten Tapin		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				126 Dokumen	126 Dokumen	677.380.900,00	50.000.000,00	0,00	-677.380.900,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				126 Dokumen	126 Dokumen	47.744.400,00	47.744.400,00	160.097.500,00	112.353.100,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				126 Dokumen	126 Dokumen	192.313.800,00	26.508.200,00	16.497.350,00	-175.816.450,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				126 Dokumen	126 Dokumen	160.730.950,00	146.435.100,00	146.681.050,00	-14.049.900,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				252 Orang	252 Orang	239.997.600,00	144.905.800,00	10.328.550,00	-229.669.050,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1 Laporan	1 Laporan	41.024.800,00	0,00	0,00	-41.024.800,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				126 Dokumen	126 Dokumen	25.371.020,00	0,00	0,00	-25.371.020,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	607.570.900,00	298.443.300,00	298.440.700,00	-309.130.200,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	1.487.638.009,00	14.688.550,00	5.071.850,00	-1.482.566.159,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	1 Laporan	25.333.900,00	25.333.900,00	18.471.200,00	-6.862.700,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																			
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				126 Dokumen	126 Dokumen	43.199.700,00	43.199.700,00	14.692.900,00	-28.506.800,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																			

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	29.915.600,00	0,00	0,00	-29.915.600,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				126 Dokumen	126 Dokumen	24.284.800,00	16.172.300,00	12.328.200,00	-11.956.600,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																			
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				126 Orang	126 Orang	25.781.700,00	150.823.900,00	10.708.600,00	-15.073.100,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																			
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				27 Desa	27 Desa	400,00	16.933.200,00	16.933.200,00	16.932.800,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa				126 Laporan	126 Laporan	20.515.520,00	18.202.320,00	10.639.600,00	-9.875.920,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				126 Dokumen	126 Dokumen	81.604.800,00	38.921.500,00	33.487.600,00	-48.117.200,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-				-	-	1.058.934.400,00	1.073.309.052,00	1.123.305.682,00	-1.058.934.400,00							0,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.058.934.400,00	1.073.309.052,00	1.123.305.682,00	64.371.282,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Kabupaten Tapin		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	2 Dokumen	209.391.200,00	213.065.600,00	213.065.600,00	3.674.400,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	4 Lembaga	270.563.050,00	302.789.402,00	352.786.902,00	82.223.852,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	194.040.400,00	194.040.400,00	194.040.130,00	-270,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				12 Laporan	12 Laporan	380.298.500,00	257.516.400,00	257.515.800,00	-122.782.700,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	4.641.250,00	105.897.250,00	105.897.250,00	101.256.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			JUMLAH						50.692.184.884,00	34.722.818.559,00	29.805.247.559,00	-20.886.937.325,00							0,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2025.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh sasaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin maupun di lingkungan daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renja perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.

BUPATI TAPIN,

YAMANI